

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bukti studi Mahardhika Berliandaldo yang berjudul “Kerja Sama dan Sinergi Antara Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kebun Raya Cibinong” sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan empat hal: (1) mengidentifikasi pihak terkait yang turut andil dalam perencanaan dan pelaksanaan pariwisata di Kebun Raya Cibinong; (2) menganalisis tugas dan wewenang setiap pihak terkait; (3) menentukan tingkat keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan; dan (4) menentukan dampak kolaborasi dan sinergi antar pihak berkepentingan. Pihak utama yang ikut andil adalah Lilipi dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pihak lain yang terlibat adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bogor, Mitra Pengelola Kebun Raya, dan Unit Pelaksana TJSL Kabupaten Bogor. Ada empat jenis pihak berkepentingan, setiap kepentingan dan tingkat pengaruh yang bervariasi: subjek, pemain kunci, pengikut lain, dan pendukung. Sektor pariwisata di Kebun Raya Cibinong dapat mengalami perkembangan yang lebih cepat sebagai hasil dari ini (Berliandaldo, Chodiq, dan Fryantoni 2021).

Studi berjudul “Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Perspektif Pemangku Kepentingan Kolaboratif dengan Pendekatan Dinamika Sistem” dilakukan oleh Salmi Yuniar Bahri. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur, serta menggambarkan, memaparkan, dan menelaah dinamika

perluasan kapasitas pariwisata. Selain itu, studi ini juga akan mengadakan uji coba yang diperluas untuk situasi di masa depan. Sebagai hasil dari analisis yang disusun untuk tujuan pemajuan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Timur, Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Perspektif Dinamika Sistem dipresentasikan di atas. Jika dikelola dengan baik melalui kerja sama, industri pariwisata di Kabupaten Lombok Timur yang dipenuhi oleh sumber daya alam memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mencapai tujuan-tujuan lainnya. Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menurut model simulasi, harus menyediakan semua variabel yang relevan, termasuk kolaborasi, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), kapasitas potensi manusia yang baik, dan pendanaan yang memadai (Yuniar Bahhri et al. 2023).

Makalah berjudul “Kebijakan Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Indonesia: Pendekatan Quadruple Helix” ditulis oleh Gede Wirata dan Made Mulia Handayani. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pendekatan quadruple helix telah diterapkan dalam kebijakan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif untuk menganalisis data yang dikumpulkan, yang didasarkan pada penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mengatur pertumbuhan ekowisata di wilayah tertentu, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2009 pada tahun 2010. Sebagai pedoman utama untuk perluasan ekowisata di berbagai wilayah, peraturan ini merupakan kebijakan tertulis satu-satunya yang

diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait ekowisata hingga tahun 2011. Untuk berperan dalam pengembangan ekowisata, masyarakat atau komunitas harus mampu memanfaatkan peluang, bersedia berpartisipasi, dan memiliki akses terhadap peluang tersebut. Hal ini berarti keterlibatan komunitas tidak hanya sebatas ikut serta, tetapi juga menyadari bahwa komunitas terlibat di setiap tahap proses, mulai dari merumuskan ide hingga mengevaluasi apakah pengembangan tersebut feasible dan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, universitas telah memperkaya industri pariwisata melalui penelitian tentang desa wisata dan program pariwisata, serta membantu dalam pendirian desa-desa wisata di berbagai lokasi ikonik. Pengembangan, penerapan, dan evaluasi kebijakan ekowisata merupakan langkah awal yang baik dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perusahaan di sektor ekowisata sebaiknya membantu meningkatkan perekonomian lokal dengan memaksimalkan potensi objek wisata populer, sementara pemerintah dan warga harus berkolaborasi untuk mengawasi agar objek-objek wisata ini tetap terbuka bagi generasi mendatang (Wirata et al., 2023).

Tesis Hana Imtiyaza berjudul “Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes” diterbitkan pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji berbagai cara di mana daya tarik alam Kabupaten Brebes dapat meningkatkan perekonomian lokal, salah satunya melalui pembentukan desa wisata. Ekosistem hutan mangrove di Kaliwlingi telah berperan penting dalam mengangkat Desa Wisata Kaliwlingi menjadi destinasi wisata ikonik di Kabupaten Brebes. Sebagai ciri khasnya, destinasi wisata ini menggabungkan pengetahuan lokal dengan aspek ekologi, sosial, dan tradisi. Mengacu pada

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021, pembangunan Desa Wisata Kaliwlingi didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan merupakan landasan bagi pertumbuhan Desa Wisata Kaliwlingi. Para peneliti dalam studi ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tata kelola kolaboratif dalam pembangunan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes. Referensi dalam penelitian ini meliputi teori tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash serta teori unsur-unsur yang menghambat tata kelola kolaboratif karya Mattessich dan Monsey. Pendekatan yang diterapkan pada studi ini adalah kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kombinasi observasi, wawancara, dan catatan tertulis. Kajian ini menemukan bahwa meskipun tata kelola kolaboratif telah diterapkan untuk pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi, namun belum mencapai potensi maksimalnya. Hal ini meliputi interaksi langsung, pembentukan keyakinan, dedikasi pada proses, dan harmoni pemikiran. Menurut Imtiyaza dan Sunu Astuti (2023), proses kolaboratif terhambat oleh faktor-faktor seperti keanggotaan, struktur, komunikasi, dan sumber daya.

Penelitian ini dilakukan oleh Erica Indah Maulia. Dokumen ini mengkaji dampak digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran sebagai bagian dari upaya tata kelola kolaboratif. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji manfaat tata kelola kolaboratif sebagai alat untuk pertumbuhan industri pariwisata. Salah satu metode guna peningkatan pengembangan pariwisata adalah dengan menyertakan berbagai pemangku kepentingan selaras dengan kompetensi tiap individu. Meskipun pendekatan kolaboratif ini tampak menjanjikan, implementasinya akan sulit, terutama terkait dengan keberlanjutan. Berdasarkan model tata kelola kolaboratif

Ansell dan Gash yang mencakup indikator seperti Dialog Langsung, Membangun Kepercayaan, Komitmen terhadap Proses, Pembagian Pemahaman, dan Hasil Sementara studi ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Dampak digitalisasi desa wisata juga akan dibahas dalam penelitian ini. Memahami cara berbeda orang dan kelompok menafsirkan masalah tersebut memerlukan pendekatan kualitatif, yang digunakan dalam studi ini. Metode pengumpulan data meliputi pencatatan, pengamatan, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa lima proses kolaborasi diterapkan dengan baik, yang mengarah pada pembentukan proses kolaborasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Banyak organisasi yang berbeda, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, bekerja sama untuk menjadikan Desa Wisata Nglanggeran sukses. Meskipun kemitraan ini telah berkembang pesat, masih banyak hal yang dapat salah. Misalnya, terdapat kurangnya regenerasi kepemimpinan, manfaat tidak terdistribusi secara merata, dan pemangku kepentingan tidak selalu mendukung upaya konservasi lingkungan di Nglanggeran. Sebuah studi kedua tentang digitalisasi di Desa Wisata Nglanggeran mengonfirmasi apa yang sudah banyak diketahui digitalisasi membantu bisnis mempromosikan dan melayani pengunjungnya dengan lebih baik. Facebook, Twitter/X, Instagram, dan TikTok hanyalah beberapa platform media sosial, situs web, dan blog yang telah berkontribusi pada digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran. Hasil studi menunjukkan bahwa digitalisasi bermanfaat dalam empat hal: pertama, membantu perekonomian lokal tumbuh berkat wisatawan, kedua, menarik lebih banyak wisatawan, dan

ketiga, mempromosikan objek wisata Nglanggeran dengan lebih baik (Maulia dan Setiyono 2024).

Dalam studinya yang berjudul “Pemerintahan Kolaboratif Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar)”, Ida Ayu Dewi Indrayani memaparkan temuan-temuannya. Desa Wisata Taro di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, merupakan studi kasus yang dirancang untuk mengkaji penerapan pemerintahan kolaboratif berbasis pentahelix dalam pembentukan komunitas wisata ramah lingkungan. Pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media membentuk pentahelix, dan meskipun mereka telah bekerja sama secara efektif, masih ada beberapa masalah, seperti penggunaan sumber daya yang belum optimal. Strategi pemasaran yang diterapkan untuk membangun desa wisata masih belum memadai, dan terdapat kekurangan sumber daya manusia yang khusus ditugaskan untuk meneliti potensi sektor ini. Saran-saran yang mungkin meliputi hal-hal berikut: untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia, pihak pemerintah perlu mengaktifkan kembali kolaborasi pentahelix. Untuk menghidupkan kembali pemasaran berkelanjutan Desa Wisata Taro, diperlukan kolaborasi dalam pengembangan inovasi promosi baru. Slogan Desa Wisata Taro, “Destinasi Ekospiritual,” harus ditekankan dan diimplementasikan dalam semua inisiatif pariwisata desa guna menjamin keberlanjutan desa (Indrayani Dewi 2024).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Collaborative Governance

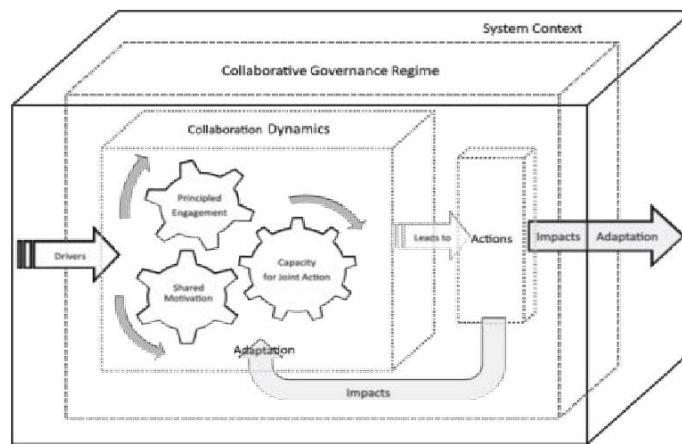
Menurut Dewi Kasita (2023), aktor pemerintah, entitas swasta, dan unsur masyarakat bekerja sama di ruang publik untuk mencapai tujuan publik (kesejahteraan) yang tidak mungkin tercapai jika hanya satu pihak yang terlibat. Pendekatan ini disebut Collaborative Governance, menurut Emerson dan Nabatchi. Proses kolaboratif, menurut Emerson, memerlukan pengambilan keputusan dan pelaksanaan secara kelompok selain pertukaran informasi. Keterlibatan, motivasi bersama, dan kemampuan untuk berkolaborasi adalah tiga karakteristik yang harus dimiliki oleh semua pemangku kepentingan agar proses kolaboratif dapat berhasil mencapai tujuannya (Bila dan Saputra 2020).

Para peneliti memilih untuk menerapkan Teori Tata Kelola Kolaboratif Emerson dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, teori ini sangat tepat untuk menangani masalah yang dihadapi. Menurut Nasrulhaq (2020), teori proses kolaborasi, yang juga dikenal sebagai Regime Tata Kelola Kolaboratif (CGR), memberikan penjelasan komprehensif tentang bagaimana kolaborasi dapat beroperasi secara dinamis dan siklikal untuk menghasilkan tindakan dan hasil sementara sebelum mencapai hasil utama, serta beradaptasi dengan dampak yang timbul. Pemerintahan kolaboratif merujuk pada proses atau gagasan di mana kelompok atau lembaga dari berbagai sektor (seperti sektor publik, sektor swasta, masyarakat sipil, dan LSM) bekerja sama untuk merumuskan kebijakan, menangani masalah publik, dan melaksanakan program pemerintah.

Kerja sama pemerintah memiliki tiga komponen utama, menurut Emerson dan Nabatchi. Salah satunya adalah kepemimpinan kolaboratif, yang berarti para

pemimpin memainkan peran krusial dalam mengumpulkan semua pihak yang terlibat untuk membentuk tim yang kohesif dan mampu mencapai efektivitas maksimal. Komponen kedua adalah Kapasitas untuk Tindakan Bersama, yang merujuk pada pengaturan kapasitas kolaboratif sebagai struktur atau mekanisme untuk mendukung tindakan bersama, komunikasi yang efektif, dan sumber daya (Rozikin dan Ap 2019). Komponen ketiga adalah Motivasi Bersama, yang merujuk pada faktor teknis yang bertujuan untuk membangun kepercayaan atau komitmen bersama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif melalui pemahaman bersama dan keselarasan tujuan. Seberapa besar porsi atau pembagian sumber daya yang ada adalah yang dimaksud. Dengan cara ini, kita semua dapat bekerja sama untuk memperbaiki kelemahan kita dan memanfaatkan kelebihan kita, menciptakan lingkungan di mana kerja sama dan tindakan saling mendukung. Kegiatan kolaboratif dilakukan sebagai strategi pelengkap untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. Sektor publik, seperti sektor swasta, media, dan organisasi non-pemerintah (LSM), memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kerjasama dilakukan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Salah satu alasan umum yang sering diajukan untuk kegagalan dalam menyelesaikan beberapa masalah adalah kekurangan sumber daya (Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho dan Arif 2023).

Gambar 2.1 Model Collaborative Governance Emerson dan Nabatchi



Sumber: (Emerson et al., 2012)

Model Tata Kelola Kolaboratif (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson dan Nabatchi menggambarkan proses lima langkah untuk memaksimalkan efektivitas kolaborasi dalam suatu sistem. Tahap pertama adalah *Drivers* (Pemicu), yang menjadi dasar munculnya kebutuhan kolaborasi. Pemicu ini dapat berupa krisis, kebutuhan bersama, atau ketergantungan antar pihak. Dalam konteks ekowisata berkelanjutan di Desa Bumiaji, Pemerintah Desa Bumiaji dan pihak swasta, yaitu PT Bunga Cinta Sedjati, memiliki faktor pemicu berupa kebutuhan bersama untuk mengelola potensi ekowisata secara efektif dan berkelanjutan. Pemicu ini menciptakan konteks yang mendasari kolaborasi mereka. Selanjutnya adalah *Collaboration Dynamics* (Dinamika Kolaborasi), yang terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, *Principled Engagement* (Keterlibatan Berdasarkan Prinsip) melibatkan komunikasi terbuka, saling mendengarkan, membangun pemahaman bersama, dan melakukan dialog konstruktif antara Pemdes Bumiaji dan PT Bunga Cinta Sedjati. Kedua, *Shared Motivation* (Motivasi Bersama) yang melibatkan pembentukan kepercayaan, penghormatan, dan komitmen untuk mewujudkan visi tujuan. Ketiga, *Capacity for Joint Action* (Potensi untuk Bertindak Serentak) mencakup kemampuan kolektif kedua pihak dalam merencanakan,

mengelola sumber daya, dan melaksanakan tindakan bersama demi tercapainya tujuan kolaborasi.

Tahap berikutnya adalah *Actions* (Tindakan), yang merupakan implementasi dari dinamika kolaborasi dalam bentuk tindakan konkret. Dalam konteks ini, Pemdes Bumiaji dan PT Bunga Cinta Sedjati bersama-sama mengambil langkah-langkah nyata, seperti pengelolaan kawasan ekowisata, pelatihan masyarakat lokal, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung ekowisata berkelanjutan. Tahap ini kemudian menghasilkan *Impact* (Dampak), berupa dampak positif seperti peningkatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampak negatif juga bisa muncul, seperti konflik kepentingan atau tantangan dalam pengelolaan sumber daya. Terakhir, tahap *Adaptation* (Adaptasi) memungkinkan adanya pembelajaran dan penyesuaian dalam sistem kolaborasi berdasarkan dampak yang dihasilkan. Proses adaptasi ini bertujuan untuk menyempurnakan kolaborasi di masa mendatang, sehingga keberlanjutan ekowisata tetap dipertahankan dengan lebih bagus dan membawa kebaikan sepenuhnya untuk seluruh pihak yang ikut andil. Dengan demikian, kerangka kerja CGR membantu memberikan panduan sistematis dalam mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan di Desa Bumiaji.

Ketiga, konsep yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi membagi Collaborative Governance menjadi komponen-komponennya, di mana yang paling penting adalah pendorong, dinamika kolaborasi, dan sistem konteks. Kondisi lingkungan, atau sistem konteks, memengaruhi kelangsungan jangka panjang Collaborative Governance dan, dengan demikian, kemungkinan dan batasan untuk mencapai dan beroperasi dalam sistem tersebut. Lingkungan unik layanan publik,

peraturan dan regulasi yang berlaku, norma dan nilai budaya, faktor sosial dan ekonomi, dinamika kekuasaan, serta konflik masa lalu merupakan bagian dari sistem konteks. Faktor-faktor seperti kepemimpinan awal, insentif yang signifikan, ketergantungan timbal balik, dan ketidakpastian dikenal sebagai pendorong proses kolaborasi (Wahyudin, Subagdja, dan Iskandar 2023).

2.2.2 Tujuan dari Collaborative Governance

Di dalam pelaksanaan pemerintah, aspek kolaborasi menjadi suatu hal yang sangat penting dan juga relevan pada saat ini di dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut tak lepas dari beragam pertimbangan yang menyokong terhadap proses tuntutan kolaboratif antar sejumlah lembaga publik maupun institusi. Kerja sama antara pemerintah tidak terjadi secara spontan (Samsara 2022). Pada kenyataannya, kerja sama tersebut merupakan hasil dari berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan koordinasi dalam menanggapi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara luas. Akibat biaya yang tinggi, politisasi regulasi, dan implementasi kebijakan yang tidak efektif atau gagal, kerja sama pemerintah dalam tata kelola telah muncul. Luluk Zakia dan Wicaksono (2023) menyoroti bahwa kerja sama umumnya dianggap sebagai hal positif karena meningkatkan pengetahuan dan kemampuan lembaga atau instansi publik.

Kerja sama antara pemerintah tidak terjadi secara spontan (Samsara 2022). Pada kenyataannya, kerja sama tersebut merupakan hasil dari berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan koordinasi dalam menanggapi masalah yang melanda masyarakat. Akibat biaya yang tinggi, politisasi regulasi, dan implementasi kebijakan yang tidak efektif atau gagal, kerja sama pemerintah dalam tata kelola telah muncul. Luluk Zakia dan Wicaksono (2023) menyoroti

bahwa kerja sama umumnya dianggap sebagai hal positif karena dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan lembaga atau instansi publik. Dari adanya kolaborasi tersebut juga di anggap sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan, hal tersebut tak terlepas dari adanya gagasan *Collaborative Governance* yang menekankan suatu partisipasi berbabagi aktor pihak terkait ibarat pemerintah yang melibatkan khalayak, dan juga pihak swasta di area pelaksanaannya (Dwiyanto Widyaiswara 2022)

Collaborative Governance juga bisa di danggap sebagai bentuk alternatif dalam kasus di mana manajerialisme gagal di satu organisasi, kolaboratif manajemen dapat membantu kelompok kepentingan lebih terlibat. Perkembangan yang rumit ini menumbuhkan hubungan timbal balik di antara lembaga dan meningkatkan kebutuhan akan kerja sama. Kerja sama bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan bersama tanpa mengimplikasikan pembagian tugas. Menurut Supriatno dan Rozi (2024), ketika orang bekerja bersama menuju tujuan yang sama, mereka mencapainya dengan membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan kemudian menyelesaikannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Adanya Kolaborasi tersebut tidak terbatas pada jenis atau lokasi tertentu, sebaliknya, itu melibatkan pertukaran ide-ide dan pandangan yang menawarkan sudut pandang bagi berbagai kalangan yang berpartisipasi. Guna bisa menjalin relasi kolaborasi tepat sasaran tentu diutamakan gegar mutual toleransi atau kondisi di mana terjadi benturan atau konflik antara pihak-pihak yang seharusnya memiliki hubungan saling menghormati. Hal tersebut bisa terjadi baik kesepakatan maupun ketidaksetujuan diperlukan untuk mencapai hubungan kerja yang efektif (Luqito and Arrozaaq 2023). Kemitraan yang mendorong kerja sama memiliki keuntungan

yang signifikan bagi baik investor maupun konsumen, karena hasil yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

2.2.3 Pengertian Ekowisata

Pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan dikenal sebagai ekowisata. Perhatian yang cermat terhadap cara hidup masyarakat setempat dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan kemanusiaan merupakan ciri khasnya. Hal ini juga penting dalam partisipasi dalam pengelolaan potensi pariwisata, yang melibatkan optimalisasi nilai dan manfaat finansial pariwisata dengan memanfaatkan pengetahuan tentang budaya dan alam lokal. Menurut Djoko Baruno et al. (2023), terdapat korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekowisata dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal dalam hal ekologi, sosial, dan ekonomi.

Pembangunan daerah pedesaan melalui ekowisata dapat dicapai melalui ekowisata berbasis masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Ratuloly, Rifa'i, dan Hardianto (2023). Selain mempromosikan pelestarian ekosistem dan melibatkan warga lokal dalam pengelolaan pariwisata, ekowisata memanfaatkan kekayaan alam sebagai daya tarik. Karena masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ekowisata, pertumbuhan model berbasis masyarakat ini menjamin bahwa destinasi wisata populer akan tetap ada dalam jangka panjang. Dampak positif terhadap lingkungan adalah manfaat lain dari ekowisata.

Definisi lain dari ekowisata adalah “wisata yang mempromosikan perubahan sosial dan lingkungan yang positif melalui kunjungan ke kawasan alam” (Kristiono

dan Awan Setia D, Kristiono Dwi Susilo, dan Setia Dharmawan 2021). Upaya yang berskala kecil atau yang menyoroti pentingnya keberlanjutan lingkungan dan komunitas dapat didefinisikan sebagai ekowisata. Ekoturisme, menurut definisi alternatif, adalah jenis pariwisata yang memprioritaskan pelestarian sumber daya alam dan budaya sambil juga memasukkan unsur-unsur pendidikan. Ekoturisme, dalam bentuknya yang paling dasar, bertujuan untuk melindungi tidak hanya alam dan ekonomi lokal, tetapi juga warisan budaya yang kaya dari tempat-tempat yang dikunjungi. Tidak ada definisi yang secara universal diterima untuk ekoturisme; namun, menurut Wahyuningsih (2021), lima faktor berikut ini menjadi dasar dari semua operasi ekoturisme:

- a. Terampil dalam mengapresiasi objek wisata dan membimbing tamu untuk memahami informasi pendidikan atau lingkungan yang disajikan di sana.
- b. Diperkirakan bahwa ekowisata dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan memastikan bahwa lingkungan tersebut dikelola dan dipelihara dengan baik.
- c. Pemerintahannya harus memastikan keterlibatan aktif masyarakat setempat.
- d. Penduduk setempat yang tinggal di sekitar kawasan ekowisata seharusnya dapat memperoleh manfaat finansial dari kawasan tersebut.
- e. Tidak pernah menyerah dan selalu mengutamakan perlindungan lingkungan.

2.2.4 Pengembangan Ekowisata

Tujuan ekowisata, salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan, adalah untuk melestarikan warisan budaya dan alam sambil menyediakan keuntungan bagi warga

lokal dan operator wisata. Ekonomi lokal juga dapat menikmati manfaat finansial dari ekowisata. Definisi kedua ekowisata adalah bentuk pariwisata yang mempromosikan kesadaran lingkungan dan pelestarian sumber daya alam secara ekonomis berkelanjutan. “Perkembangan ekowisata harus memberdayakan masyarakat lokal” (adoc.pub 2024) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, yang mengatur Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Masyarakat setempat, yang juga tertarik pada industri pariwisata, dapat berperan dalam membentuk masa depan wilayah tersebut dan meningkatkan perekonomian mereka sendiri dengan memanfaatkan peluang ini. Pengembangan ekowisata di Indonesia harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 8013:2014 2024):

- a. Keseimbangan proses ekologis
- b. Keseimbangan objek pesona ekowisata
- c. Keseimbangan aspek sosial dan kultural
- d. Tingkat kepuasan, proteksi dan rasa nyaman pengunjung
- e. Asas nilai finansial

2.2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan seseorang berarti mengambil tindakan yang bertujuan untuk memberdayakan mereka, atau bertindak atas nama seseorang yang berada dalam posisi berkuasa terhadap seseorang yang dianggap kurang atau tidak memiliki kendali. Pendayagunaan masyarakat lebih ditekankan pada aspek ekonomi kerakyatan dikarenakan masyarakat diharapkan mampu untuk bisa mengembangkan dan juga mengarahkan segala potensi alam yang ada di suatu

pedesaan. Masyarakat akan lebih tahu bagaimana suatu kondisi wilayah dan juga jenis usaha yang kedepannya akan membentuk instansi dan juga struktur layanan berasal, dikelola dan ditujukan sekitar wilayah tersebut (Mohamad, Wahyuni Baderan, and Jurnal Pendidikan Biologi 2024). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendorong kemandirian dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek kemandirian ini adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengarahkan komunitasnya sendiri. Keberdayaan yang dimiliki oleh warga merupakan proses dan situasi yang dimulai untuk memungkinkan bisa memikirkan, membuat keputusan, dan memecahkan suatu masalah masalah dengan kemampuan masyarakat itu sendiri semisal dengan psikomotorik, kognitif, konatif (Clusterisasi et al. 2022).

Untuk mencapai tujuan pengembangan wisata, yaitu mendapatkan keuntungan dari pengembangan wisata sendiri, penting untuk berpartisipasi yang datang dari masyarakat setempat. Karena masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan keberlanjutan ekowisata di masa depan, pemahaman tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam pengembangan ekowisata akan berdampak positif pada masyarakat. Semua ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menarik perhatian terhadap pentingnya praktik ekowisata berkelanjutan dan peran persepsi publik dalam perencanaan dan pengelolaan program ekowisata, yang pada gilirannya memungkinkan pengelola untuk memaksimalkan manfaat.

Dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata, partisipasi masyarakat sangat penting karena memberikan peluang untuk kerja sama antara pengelola dan masyarakat (Rohani et al. 2020). Pekerjaan baru diciptakan untuk

masyarakat, yang merupakan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Kesuksesan pengelolaan ekowisata dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dalam perkembangannya. Hal ini menunjukkan sikap positif. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan ekowisata di Desa Bumiaji dapat memperoleh manfaat dari partisipasi aktif masyarakat.

